

DPRD DAN PENGANGGARAN DAERAH: Sebuah Analisis Empirik dan Praktik

Oleh:

Syukriy Abdullah
Abdul Halim



Gadjah Mada University Press

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD	1
1.2 DPRD dan Korupsi di Daerah.....	3
1.3 Dinamika Pengaturan Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah	4
1.4 Kewenangan DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	6
BAB 2 PENGANGGARAN DAERAH.....	13
2.1 Pengertian Anggaran dan Penganggaran Daerah	13
2.2 Proses Penyusunan Anggaran Daerah.....	17
2.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penganggaran Daerah	20
2.4 Struktur Anggaran Daerah	27
BAB 3 HUBUNGAN KEAGENAN DALAM PENGANGGARAN DAERAH.....	35
3.1 Pengertian dan Konteks Teori Keagenan	35
3.2 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Daerah	37

BAB 4	PERAN DPRD DALAM PENGANGGARAN DAERAH	51
4.1	Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPRD	56
4.2	Fungsi Legislasi/Pembentukan Peraturan Daerah.....	59
4.3	Fungsi Anggaran DPRD.....	63
4.4	Fungsi Pengawasan DPRD	65
4.5	Dukungan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar.....	66
BAB 5	DPRD DAN PERMASALAHAN PENGANGGARAN DAERAH.....	69
5.1	Hubungan Perencanaan dan Penganggaran	69
5.2	Pembahasan Anggaran di Komisi dan Badan Anggaran	70
5.3	Politik Anggaran Daerah.....	71
5.4	Legislatif dan Masalah Keagenan dalam Penganggaran	72
BAB 6	OPORTUNISME DPRD DALAM PENGANGGARAN DAERAH.....	83
6.1	Oportunisme Legislatif dalam Pengalokasian Anggaran Belanja.....	83
6.2	Regulasi dan Oportunisme Legislatif	88
6.3	Sumber Pendapatan dan Oportunisme Legislatif.....	93
6.4	Besaran Legislatur dan Oportunisme Legislatif.....	99
6.5	Jenis Pemerintah Daerah dan Oportunisme Legislatif	102
BAB 7	PANDANGAN DPRD TERHADAP PENGANGGARAN DAERAH.....	107
7.1	Peran DPRD di Mata Anggota DPRD	107
7.2	Pertanyaan Mendasar tentang Peran DPRD.....	109
7.3	Peran dan Fungsi DPRD dalam Penganggaran Daerah	111
7.4	Beberapa Catatan Penting	126
7.5	DPRD Partisipan dalam Diskusi Focus Group Interview (FGI).....	127

BAB 8	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN MASALAHNYA	129
8.1	Pengertian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).....	129
8.2	Mekanisme Pengajuan Pokir dalam Penganggaran Daerah	130
8.3	Pokir dan Kinerja Anggaran.....	133
8.4	Kasus Aceh: Pokir Bukan Masalah, tetapi Selalu Bermasalah.....	134
BAB 9	GAGASAN UNTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS DPRD DALAM PENGANGGARAN DAERAH.....	139
9.1	Pendahuluan	139
9.2	Kapasitas DPRD Saat Ini	142
9.3	Pemanfaatan TIK untuk DPRD.....	144
9.4	Implementasi <i>Knowledge Management</i> di DPRD	146
9.5	<i>Knowledge Sharing</i> di DPRD	149
9.6	<i>Tacit Knowledge</i> dan <i>Explicit Knowledge</i> di DPRD...	151
BAB 10	PENUTUP.....	153
	DAFTAR PUSTAKA.....	155
	GLOSARIUM	183
	BIODATA PENULIS	185